

IMPLEMENTASI ABSENSI ONLINE DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

Nadya Enjeli
NPP. 29.0229

*Asdaf Kota Padang Provinsi Sumatera Barat
Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*

Email: nadyaenjeli68@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): The author focuses on the problem where the online attendance application can only be done on Android so that employees who do not use Android have difficulty doing attendance. **Purpose:** The purpose of this study is to find out and describe the implementation of online attendance in improving employee discipline at the Agency for Personnel and Human Resources Development, Padang City, West Sumatra Province and to find out the obstacles and efforts made to overcome them. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and analysis of the theory of policy implementation from George C. Edwards III. Data collection techniques using in-depth interviews (10 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** There are no SOPs available in the implementation of online attendance so that in the absence of SOPs, employees only understand the basics and do not know detailed explanations, this is different if the attendance admin answers. **Conclusion:** That the Implementation of *Online* in Improving Employee Discipline in the Civil Service and Human Resources Development Agency of the City of Padang has been carried out quite well in the dimensions of communication, resources, and disposition. However, in the dimensions of the bureaucratic structure there are still obstacles.

Keywords: Implementation, Online Attendance, Incentives, Discipline

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan dimana pada aplikasi absensi online hanya bisa dilakukan pada android saja sehingga para pegawai yang tidak menggunakan android mengalami kesulitan dalam melakukan absensi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi absensi online dalam meningkatkan disiplin pegawai di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Provinsi Sumatera Barat serta mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam

mengatasinya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III dalam Winarno (2012). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (10 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Belum tersedianya SOP dalam pelaksanaan absensi online sehingga dengan tidak adanya SOP, maka pegawai hanya memahami dasar-dasarnya saja dan tidak tahu penjelasan rinci, hal ini berbeda apabila admin absensi yang menjawab. **Kesimpulan:** Bahwa Implementasi Absensi *Online* Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang sudah terlaksana dengan cukup baik dalam dimensi komunikasi, sumberdaya, dan disposisi. Namun, dalam dimensi struktur birokrasi masih terdapat hambatan.

Kata Kunci: Implementasi, Absensi Online, Insentif, Disiplin

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era globalisasi ditandai dengan munculnya berbagai inovasi yang diciptakan oleh manusia dalam rangka untuk membantu pekerjaan dan kegiatan lainnya agar menjadi lebih mudah. Perkembangan teknologi sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan masyarakat mengingat saat ini kita telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang pada dasarnya menerapkan teknologi khususnya digitalisasi di hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Penggunaan teknologi yang sudah dikembangkan dimanfaatkan oleh pemerintah dalam membantu proses berjalannya pemerintahan dengan mempersingkat birokrasi. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempermudah proses pertukaran informasi antara masyarakat dengan pemerintah, urusan pemerintah dengan sesama pemerintah, maupun urusan antara pemerintah dengan para pegawai pemerintahannya yang dinamakan dengan *e-government*. Hal ini kemudian meningkatkan semangat perbaikan birokrasi dan adanya peningkatan keterlibatan masyarakat pada sistem pemerintahan. Aplikasi Absensi *Online* Sumbar (*Privacy Police Abon*) atau yang disingkat menjadi Abon Sumbar merupakan aplikasi yang berfungsi untuk merekap absensi kehadiran dari pegawai di lingkup pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Aplikasi ini mengumpulkan data informasi pegawai, seperti Nomor Induk Pegawai (NIP), nama, pangkat, golongan yang langsung diambil dari aplikasi *e-SPJ online* yang merujuk kepada Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) dan lokasi terbaru pengguna. Pengumpulan informasi terjadi ketika pengguna *login* ke dalam aplikasi dengan memasukkan *username* dan *password* yang sudah terdaftar di aplikasi *e-SPJ online*. Untuk akses lokasi diperlukan ketika pegawai ingin mengambil absen. Aplikasi ini sangat membantu pemerintah dalam memantau kehadiran para pegawai yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Hal ini menjadi sorotan bagi para pegawai yang masih mengambil kesempatan untuk melakukan tindak indispilner pegawai. Sudah banyak sanksi yang diberikan terhadap para oknum pelanggar, tetapi hal tersebut tidak memberikan efek jera. Untuk memberikan pelayanan terbaik seorang pegawai harus memiliki kualitas yang mengedepankan kesiapan dalam bekerja.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Absensi Online Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yaitu Dalam mengimplementasikan aplikasi absensi *online*, pemerintah masih menemukan adanya beberapa kendala. Seperti yang disebut didalam salah satu situs berita yang mengatakan bahwa “Kalau dibandingkan dengan yang manual, terdapat beberapa kendala. Aplikasi hanya bisa digunakan pada android sehingga bagi ASN yang belum menggunakan android dan atau yang menggunakan i-phone tidak bisa mengunduh aplikasi tersebut sehingga tidak bisa menggunakan aplikasinya,” ucap Agustini, Rabu (6/1) kepada Hantaran.co. Dari sinilah dilihat bagaimana aplikasi absensi *online* tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau belum, dikarenakan aplikasi ini baru saja diresmikan oleh Pemerintah Kota Padang pada awal tahun 2020. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada latar belakang, peneliti menilai penerapan aplikasi absensi *online* masih terdapat kendala dalam penerapannya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan Implementasi Absensi Online Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Penelitian Abdu Haris Nur Sugeng berjudul *Implementasi Program SIPERLU (Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten Lumajang) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai*, menemukan bahwasannya dengan diberlakukannya absensi SIPERLU, kedisiplinan karyawan dalam bekerja mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini terbukti dengan adanya karyawan yang memiliki etos kerja yang tinggi sehingga memiliki semangat dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Safuan, Deni Rahman yang berjudul *Penerapan Sistem Absensi Online Berbasis Android (Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Jawa Barat)*, penelitian ini menjelaskan bahwasannya efektifitas penerapan kebijakan absensi online berbasis android ini masih harus terus di upgrade karena setiap saat pemerintah sebagai manajer para pegawai agar terus memantau setiap kebijakan yang mereka terapkan kepada para pegawainya dengan penuh pertimbangan dan harus melalui evaluasi yang berkala.

Penelitian berikutnya yaitu dari Andisa Risfania Syahputri yang berjudul *Pengaruh Penerapan Sistem Absensi Online dan E-LOGBOOK Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur* yang berkesimpulan bahwasannya Sistem Absensi Online dan E-Logbook memberikan pengaruh yang sedang dengan arah positif dan terbukti signifikan terhadap disiplin kerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana fokus penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari penelitian sebelumnya, selain itu lokasi penelitian yang dilakukan berada pada Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Berbeda dari Abdu Haris Nur Sugeng, Safuan, Deni Rahman, Andisa Risfania Syahputri. Selain itu Aplikasi Absensi *online* memiliki empat menu utama yang berkaitan dengan presensi pegawai. Secara umum semua

fitur tersebut dibuat untuk memudahkan pemerintah dalam memantau segala hal yang berkaitan dengan pegawai tersebut. Fitur yang tersedia di aplikasi ini adalah terkait presensi, aktifitas pegawai ketika berada di kantor atau saat melaksanakan perjalanan dinas, melaksanakan izin, rekap absensi perbulan pegawai, informasi pribadi pegawai, serta panduan penggunaan aplikasi Abon Sumbar. Berdasarkan penelitian diatas, terdapat persamaan dan perbedaan yang ditemukan oleh peneliti. Persamaannya yakni mengkaji mengenai implementasi sistem absensi *online* yang telah berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Fokus penelitian ini dipusatkan pada sistem absensi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi dengan menggunakan model Implementasi Kebijakan Edward III dalam Winarno (2012) dengan memperhatikan empat isu pokok yaitu komunikasi, sumber daya, tingkah laku dan struktur birokrasi.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi absensi online dalam meningkatkan disiplin pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Provinsi Sumatera Barat serta mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan dalam mengatasinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Absensi Online Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Provinsi Sumatera Barat ini.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, Kepala Sub Bidang Data dan Informasi, Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin serta Staff (sebanyak 3 orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Implementasi Absensi Online Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Provinsi Sumatera Barat menggunakan teori dari George C. Edwards III dalam Winarno (2012). Teori tersebut memiliki 4 indikator dalam mengukur implemementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

3.1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses pengiriman dan penerimaan informasi sehingga saling memahami. Komunikasi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan karena antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan harus memiliki informasi yang sama yaitu dalam hal tata

cara pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dibuat. Komunikasi memiliki bagian di dalamnya yaitu meliputi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Transmisi merupakan bagaimana pelaksana kebijakan memahami informasi yang disampaikan oleh pembuat kebijakan dalam melaksanakan kebijakan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang menjadi target dari transmisi ini adalah kelompok sasaran kebijakan atau pihak yang terkait. Cara yang digunakan untuk menyampaikan kebijakan terkait penerapan absensi *online* yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh kasubag umum/kepegawaian di SKPD dan admin yang telah ditunjuk sebagai verifikator absen di masing-masing SKPD yang ada di Kota Padang sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Kegiatan sosialisasi mengenai penerapan absensi *online* dilakukan di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang. Kejelasan dalam penyampaian kebijakan yaitu pada saat pelaksana kebijakan dapat mengerti tata cara pelaksanaan satu kebijakan, dalam hal ini berarti kejelasan dalam tata cara pelaksanaan pengisian absensi *online* berbasis android. Apabila kejelasan tercapai, maka penggunaan absensi ini akan berjalan dengan lancar dan juga meminimalisir masalah kedepannya. Konsistensi berikutnya dapat dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan absensi *online* dengan panduan atau SOP yang ada. Dikarenakan SOP yang tidak diterbitkan, maka kesesuaian ini dapat dilihat dari serentakannya penerapan sistem absensi *online* bagi seluruh Pegawai pada lingkungan Pemerintah Kota Padang. Berdasarkan penjelasan di atas, konsistensi yang menjadi salah satu indikator komunikasi menurut Edward III dalam Winarno (2012), dapat ditarik kesimpulan bahwa penyampaian dari pimpinan tidak mengandung penyampaian yang multitafsir. Hanya saja penyampaian kurang rinci dikarenakan tidak ada SOP penggunaan absensi tersebut.

3.2 Sumber Daya

Implementasi dapat berhasil apabila salah satu faktor yang penting didalamnya terpenuhi yaitu sumberdaya. Pada faktor ini, kemampuan pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan suatu program atau kebijakan adalah yang menjadi tolak ukur pada faktor ini. Beberapa indikator dalam aspek sumber daya yaitu terdiri dari staf, wewenang, informasi, dan fasilitas. Unsur dalam implementasi kebijakan adalah pelaksana kebijakan itu sendiri. Pelaksana kebijakan pada penerapan absensi *online* ini adalah staf atau ASN pada suatu OPD. Pada penelitian ini berfokus pada staf yang berstatus PNS yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang sebagai pengelola aplikasi absensi *online* yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Padang. Untuk kompetensi staf yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang, menurut pendapat Bapak Romy, selaku Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada tanggal 19 Januari 2021, bahwa tidak perlu kompetensi khusus bagi para ASN untuk melaksanakan absensi menggunakan sistem *online* ini. Pemberian wewenang dinilai sudah baik karena setiap staf atau yang bertindak sebagai admin mampu memahami dan melaksanakan wewenangnya yaitu sebagai perantara pegawai lainnya saat absen dan juga mengecek absensi pegawai lainnya dalam jangkauan masing masing, dan admin mengingatkan apabila ada pegawai yang lupa absen baik saat datang ke kantor maupun pulang. Dalam aspek sumberdaya, informasi merupakan hal yang diperlukan sebagai pedoman untuk melaksanakan suatu kebijakan oleh pelaksana kebijakan sehingga dapat sesuai dengan ketentuan. Dalam Absensi *online* ini terdapat beberapa informasi yang dapat didapatkan sesuai dengan pengguna. Apabila ada ASN ingin menanyakan data atau ingin memperbaiki absen, harus ada konfirmasi dari pimpinan instansi dan bisa juga dengan menghubungi admin yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang. Hal ini dilakukan agar tidak

digunakan dengan seandainya atau menghindari pemalsuan data. Fasilitas merupakan salah satu indikator dalam sumber daya dimana juga berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan. Indikator ini juga seharusnya dipenuhi karena jika tidak maka akan menghambat implementasi suatu program. Fasilitas menyangkut dengan ketersediaan fasilitas untuk mendukung implementasi absensi sistem *online* ini. Masyarakat Kota Padang kini dapat mengakses koneksi internet dengan menggunakan wifi gratis yang terdapat di setiap kantor OPD maupun kantor kelurahan. Hal ini difasilitasi guna mempermudah pekerjaan yang membutuhkan koneksi internet. Jadi, untuk fasilitas internet sudah ada jadi dapat membantu meringankan pekerjaan yang ada di setiap OPD.

3.3 Disposisi

Disposisi adalah sikap dari seorang pelaksana kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kemungkinan kebijakan akan berjalan dengan lancar dapat dilihat dari penerimaan pelaksana kebijakan, apabila diterima dengan baik maka kebijakan juga akan dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Disposisi berkaitan dengan kecenderungan pelaksana, keinginan dan juga kemauan untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh sehingga tujuan dapat diwujudkan. Indikator dalam disposisi yaitu ada dua antara lain yaitu komitmen dan insentif. Komitmen dalam penerapan absensi *online* di lingkungan pemerintahan Kota Padang ditunjukkan dengan para pegawai yang sudah tepat waktu pada saat masuk dan juga pulang dari kantor. dapat dilihat bahwa penerapan system absensi *online* sudah berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari komitmen yang telah dipegang dan dilaksanakan oleh pegawai yang melaksanakan absensi *online*. Insentif yaitu suatu keuntungan atau biaya tertentu yang dapat menjadi pendorong bagi pelaksana kebijakan agar melaksanakan kebijakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Pemberian insentif dapat menentukan sikap pelaksana sehingga dapat meningkatkan kedisiplinan pegawai. Pegawai yang selalu melaksanakan absen secara tepat waktu baik saat jam masuk kantor maupun jam pulang kantor tidak akan terkena potongan TPP setiap bulannya kecuali jika terkena sanksi lainnya, namun untuk insentif lebih jelasnya menurut penjelasan Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin belum ada kebijakannya. Sebaliknya, sebagai punishment atau sanksi yaitu berupa pemotongan TPP sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2021, dan juga menurut PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dapat disimpulkan bahwa pegawai tidak termotivasi untuk disiplin menaati jam kerja karena tidak ada insentif ataupun penghargaan yang diberikan. Para pegawai hanya berusaha tidak melewati batas keterlambatan setiap bulannya yaitu sebesar 5 jam sehingga tidak mendapatkan potongan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu hal penting dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Hal yang menjadi perhatian adalah mengenai SOP (Standard Operating Procedures) dimana memuat tahapan-tahapan dalam melaksanakan suatu kebijakan, dalam pembahasan ini yaitu mengenai absensi dengan sistem *online*. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa SOP penggunaan absensi *online* di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang belum tersedia, namun mengenai penerapannya disampaikan melalui Surat Edaran. Dengan demikian pegawai menerima informasi lainnya melalui penjelasan lisan oleh rekan-rekan kerjanya.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Implementasi Absensi *Online* Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang sudah terlaksana dengan cukup baik dalam dimensi komunikasi, sumberdaya, dan disposisi. Namun, dalam dimensi struktur birokrasi masih terdapat hambatan. Berdasarkan pada pengamatan penulis di lapangan serta hasil wawancara, analisis dari penulis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan absensi *online* telah disampaikan dengan baik secara formal maupun informal dan sesuai dengan arahan, namun belum tersedianya SOP sehingga mempengaruhi kejelasan dan penyampaian informasi. Namun, dalam hal konsistensi sesuai dengan arahan dimana harus menunjuk salah seorang admin. Pada sumber daya dapat dihasilkan bahwa implementasi absensi *online* masih ada kekurangan. Selain itu, wewenang sudah diatur dan fitur-fitur yang terdapat di aplikasi absensi *online* cukup baik dan sangat mudah untuk digunakan. Pada disposisi dapat disimpulkan bahwa pegawai masih terdapat kekurangan dalam melaksanakan kebijakan dan juga karena belum adanya kebijakan pemberian insentif dan pegawai sudah dapat dikatakan disiplin dalam menaati peraturan jam masuk kerja. Sedangkan pada struktur birokrasi dapat disimpulkan bahwa implementasi absensi *online* sudah baik. Namun, karena belum adanya SOP sehingga prosedur dalam implementasi absensi *online* belum terarah secara rinci.

Aplikasi ini sudah berjalan cukup efektif seperti temuan Abdu Haris Nur Sugeng (Abdu Haris Nur Sugeng, 2021) namun program ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu Belum tersedia SOP dalam pelaksanaan absensi *online*. dan pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan baik.

Selain itu, penelitian ini berbeda dari penelitian Safuan, Deni Rahman (Safuan, Deni Rahman, 2021) dimana Aplikasi Absensi *Online* ini merupakan sebuah program dan kegiatan dibawah kendali BKPSDMD sehingga penegakkan dan pembinaan disiplin pegawai dapat berjalan dengan baik dan meningkatkan konsistensi setiap OPD dalam penerapan Aplikasi Absensi *Online*.

Sarana prasarana berupa komputer dan server tersendiri untuk mengelola laporan daftar hadir ASN serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Padang selalu pro aktif dalam mengelola dan menyampaikan laporan daftar hadir ASN di Lingkungan OPDnya masing-masing seperti temuan Andisa Risfania Syahputri (Andisa Risfania Syahputri, 2021).

3.6 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam Implementasi Absensi *Online* Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang ini yaitu Belum tersedianya SOP dalam pelaksanaan absensi online dimana *Standard Operating Procedure* (SOP) merupakan suatu dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dijalankan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mendapatkan hasil kerja yang efektif dan efisien. Pada penelitian penulis mendapatkan jawaban dari beberapa narasumber dan narasumber tersebut menyebutkan bahwa SOP untuk pelaksanaan absensi ini belum tersedia. Dengan tidak adanya SOP, maka pegawai hanya memahami dasar-dasarnya saja dan tidak tahu penjelasan rinci, hal ini berbeda apabila admin absensi yang menjawab. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tanpa adanya SOP pegawai biasa tidak paham betul keseluruhan fungsi dari absensi *online* ini. Selain itu salah satu faktor penting selanjutnya yaitu pengawasan. Implementasi absensi *online* ini tidak akan maksimal apabila tidak didukung oleh pengawasan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara sistem absensi ini bisa merekam lokasi saat absen. Hal ini berarti lokasi terlacak saat merekam absen, namun sistem ini

tidak bisa melacak aktivitas pegawai apabila setelah melaksanakan absen pegawai tersebut tidak di lokasinya. Hambatan lainnya yaitu aplikasi ini hanya bisa dioperasikan di gadget android saja sehingga Karena keterbatasan ini pegawai yang memiliki gadget dengan sistem operasi iOS memiliki dua gawai. Hal ini dianggap merepotkan dan keberatan untuk membeli dua gawai. Selain itu pegawai dapat melakukan hal yang curang karena bisa menitipkan absen kepada rekannya tidak berada di kantor.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan Bahwa Implementasi Absensi *Online* Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang sudah terlaksana dengan cukup baik dalam dimensi komunikasi, sumberdaya, dan disposisi. Namun, dalam dimensi struktur birokrasi masih terdapat hambatan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Provinsi Sumatera Barat sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat George C. Edwards III dalam Winarno (2012).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Absensi *Online* Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Padang Provinsi Sumatera Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Safuan, S., & Rahman, D. (2021). Penerapan Sistem Absensi Online Berbasis Android (Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka Jawa Barat). *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis-JTEKSIS*, 3(1), 267-275.
- Sugeng, A. H. N., Muchsin, S., & Hayat, H. (2021). Implementasi Program Si Perlu (Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten Lumajang) Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai (Studi Kebijakan Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang). *Respon Publik*, 15(7), 69-75.
- Syahputri, A. R. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Absensi Online dan E-Logbook Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Badan kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Fisip UNMUL*.
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta : CAPS.